

## LI. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hutan berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan berisi Sumber Daya Alam (SDA) yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya. Hutan berdasarkan statusnya dibedakan atas hutan negara dan hutan hak. Hutan rakyat adalah hutan yang merupakan hutan hak atau hutan yang berada di luar kawasan milik pemerintah. Hutan rakyat pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.

Hutan rakyat merupakan hutan yang tumbuh di atas lahan milik masyarakat dengan luas minimal 0,25 Ha, serta penutupan tajuk lebih dari 50% yang didominasi oleh tanaman perkayuan dan atau tanaman tahun pertama dengan jumlah minimal 500 batang (SK Menteri Kehutanan Nomor 49/Kpts-11/1997). Hutan rakyat ada di lahan milik rakyat, yang dibebani pajak hasil bumi dan bangunan milik perseorangan. Hutan negara merupakan area lahan yang berada di bawah kewenangan pemerintah, yang tidak dibebani hak atas tanah. Di Jawa Tengah, menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) luas lahan hutan rakyat tahun 2015 yakni 640.393, 90 Ha.

**Tabel 1.** Luas Hutan Rakyat Tahun 2011 - 2015

Kabupaten/ Kota	2011 (Ha)	2012 (Ha)	2013 (Ha)	2014 (Ha)	2015 (Ha)
Cilacap	52.485,00	48.885,63	57.470,00	57.470,00	57.470,00
Banyumas	24.766,00	24.766,00	24.766,00	35.266,00	25.266,00
Purbalingga	30.535,58	30.535,58	30.535,58	30.535,58	30.535,58
Banjarnegara	32.440,11	32.440,11	32.440,11	32.440,11	32.440,11
Kebumen	18.086,00	2.411,00	24.011,00	18.249,63	18.249,63
Purworejo	20.499,00	21.140,00	40.415,00	40.415,00	40.415,00
Wonosobo	19.418,58	19.418,58	20.614,16	20.614,16	20.614,16
Magelang	20.063,50	20.613,50	20.613,50	25.234,70	25.234,70
Boyolali	19.993,28	19.993,28	19.993,28	20.107,97	20.107,97
Klaten	2.076,00	276,00	6.125,70	12.497,00	12.497,00
Sukoharjo	17.982,00	17.932,00	7.984,00	7.984,00	7.984,00
Wonogiri	38.803,00	39.503,00	39.953,00	40.428,00	40.428,00
Karanganyar	13.494,00	13.722,30	16.322,00	16.687,21	16.687,21
Sragen	21.974,99	21.974,99	21.974,99	21.974,99	21.974,99
Grobogan	16.678,00	2.035,47	18.760,14	19.795,14	19.795,14
Blora	17.265,23	17.265,23	39.581,09	18.302,31	18.302,31
Rembang	14.100,65	14.225,65	14.225,65	14.225,65	14.225,65
Pati	23.681,05	23.681,50	23.681,05	34.683,00	34.683,00
Kudus	3.500,00	1.660,00	5.353,51	5.469,63	5.469,63
Jepara	10.936,21	18.285,78	17.986,72	17.945,53	17.945,53
Demak	5.539,60	5.539,60	5.208,59	5.334,59	5.394,00
Semarang	16.071,50	16.071,50	14.829,24	15.613,10	15.613,10
Temanggung	14.855,00	17.635,00	17.635,00	19.885,00	19.885,00
Kendal	47.329,00	47.329,00	30.755,22	28.784,14	28.784,14
Batang	17.138,80	17.138,80	12.767,21	14.752,34	14.752,34
Pekalongan	18.089,77	18.167,31	18.360,31	18.385,37	18.385,37
Pemalang	18.473,21	18.473,21	18.473,21	18.473,21	18.473,21
Tegal	6.925,00	11.295,86	6.924,00	8.192,76	8.192,76
Brebes	17.055,00	17.373,00	17.373,00	20.820,00	20.820,00
Kota Magelang	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Kota Surakarta	49,94	49,94	49,94	49,94	49,94
Kota Salatiga	906,00	2.878,00	2.935,00	928,28	928,28
Kota Semarang	2.142,90	2.142,90	9.615,00	8.631,90	8.631,90
Kota Pekalongan	157,00	157,00	91,97	91,97	91,97
Kota Tegal	11,80	11,80	16,28	16,28	16,28

Sumber : DLHK Provinsi Jateng

Hutan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, seperti menyediakan oksigen, menyerap karbon dioksida, menjaga kelestarian plasma nutfah dan keanekaragaman hayati. Fungsi orologis hutan adalah untuk mencegah erosi dan melindungi lapisan atas tanah oleh akar pohon. Akar pohon dapat mencegah terjadinya pengikisan tanah. Hutan mempunyai fungsi klimatologis atau mengatur iklim. Peranan hutan dalam klimatologis adalah menjaga kelembaban dan suhu udara. Hutan juga memiliki fungsi hidrologis yakni mengatur tata air. Hutan secara hidrologis berperan menyimpan air dan mengatur distribusinya dalam bentuk mata air (Nazaruddin, 1994 dalam Dewiyanti, 2007).

Manfaat hutan akan maksimal jika pengelolaan hutan sesuai dengan kaidah konservasi dan mampu menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta harus dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan antara aspek sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan yang bertujuan menjamin keutuhan lingkungan hidup serta kesejahteraan, keselamatan, kemampuan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Prinsip dari pembangunan berkelanjutan meliputi keadilan antargenerasi, keadilan dalam satu generasi, prinsip kehati-hatian, dan perlindungan keanekaragaman hayati, serta mekanisme insentif dan internalisasi biaya lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan dapat menyelaraskan manfaat hutan untuk kepentingan produksi/ekonomi maupun kelestarian lingkungan hidup. Definisi

lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua keadaan, benda, daya, dan makhluk hidup, termasuk manusia beserta perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan umat manusia serta makhluk hidup lain.

Hutan juga harus dapat memberikan kesejahteraan bagi manusia, terutama masyarakat yang hidupnya tergantung dari hasil hutan. Pohon hasil tebangan dari hutan merupakan salah satu nilai langsung manfaat hutan secara ekonomi. Nilai ekonomi kayu yang tinggi inilah yang merupakan salah satu tujuan utama pengembangan hutan rakyat oleh petani. Petani sering kali menebang pohon sebelum tiba masa tebang yang ideal, biasanya karena alasan ekonomi, sehingga manfaat pohon tidak dapat secara maksimal diperoleh.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian pinjaman bagi petani hutan rakyat dalam bentuk Fasilitas Dana Bergulir (FDB) Pinjaman untuk memaksimalkan manfaat hutan secara ekonomi dan ekologi. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.59/Menlhk-Setjen/2015 tentang tata Cara Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, FDB Pinjaman merupakan dana bergulir yang diberikan dalam bentuk hutang dari Pusat P2H kepada penerima FDB untuk usaha bidang kehutanan dalam rangka kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), dengan kewajiban mengembalikan pinjaman dan bunganya. Prinsip pemberian FDB adalah pengentasan kemiskinan, peningkatan pemberdayaan ekonomi rakyat, peningkatan produktifitas hutan, perluasan kesempatan kerja, serta

perbaikan mutu lingkungan melalui kegiatan RHL, dengan tetap memperhatikan persyaratan terjangkau dan prinsip kehati-hatian.

Salah satu skema pembiayaan FDB Pinjaman adalah pinjaman tunda tebang tanaman kehutanan atau lebih dikenal dengan kredit tunda tebang pohon. Berdasarkan Peraturan Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Nomor P.2/P2H/APK/SET.1/2016 tentang Pedoman Permohonan Pembiayaan Fasilitas Dana Bergulir untuk Usaha Kehutanan Skema Pinjaman, yang dimaksud dengan kredit tunda tebang pohon adalah salah satu jenis FDB Pinjaman untuk mendukung upaya menunda penebangan pohon agar dicapai umur masak tebang, dengan demikian akan diperoleh nilai ekonomi pohon yang lebih optimal.

Kredit tunda tebang pohon adalah pinjaman dana yang diberikan oleh pemerintah kepada petani hutan rakyat, yang di lahannya telah ditanami pohon. Program kredit tunda tebang diperuntukan bagi petani yang membutuhkan dana hutang, dengan jaminan kredit berupa pohon. Dana hasil pinjaman dapat dipakai petani debitur untuk usaha produktif. Kredit yang diberikan akan memberikan dampak pada petani yang awalnya hendak menebang pohon untuk memenuhi kebutuhannya, dapat memakai dana dari kredit sehingga tidak perlu lagi menebang pohon, dengan demikian laju penebangan dapat dikurangi.

Laju penebangan di tingkat Jawa Tengah cukup tinggi, kondisi tersebut dapat terlihat dari produksi kayu bulat hutan rakyat. Produksi kayu bulat hutan rakyat merupakan jumlah/volume tebang kayu yang berasal dari hutan milik rakyat. Produksi kayu bulat yang bertambah tiap tahunnya, menunjukkan

penebangan yang dilakukan oleh masyarakat di hutan rakyat semakin banyak, sehingga mengakibatkan laju penebangan menjadi tinggi.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa tengah, produksi kayu bulat hutan rakyat di Kabupaten Semarang mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2017 produksi kayu bulat dari Kabupaten Semarang menduduki peringkat ke-lima dari 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

Produksi kayu bulat hutan rakyat di Kabupaten Semarang pada periode 2016-2017 mengalami peningkatan 164,71%, yakni dari 45.323,17 m<sup>3</sup> menjadi 119.975,17 m<sup>3</sup>. Persentase peningkatan volume produksi kayu bulat di Kabupaten Semarang merupakan yang ke-3 di tingkat Jawa Tengah. Persentase peningkatan volume produksi terbanyak adalah Kabupaten Rembang, yakni 1.527,98%, dari 1.774,53 m<sup>3</sup> (tahun 2016) menjadi 28.889,03 m<sup>3</sup> (tahun 2017). Peringkat kedua adalah Kabupaten Kudus, yaitu sebanyak 178,11%, dengan volume produksi dari 3.846,03 m<sup>3</sup> (tahun 2016) menjadi 10.696,28 m<sup>3</sup> (tahun 2017). Tingginya produksi kayu bulat dari hutan rakyat, menunjukkan cukup tingginya laju penebangan pohon oleh petani di Kabupaten Semarang. Adanya program kredit tunda tebang pohon di Kabupaten Semarang, diharapkan dapat mengurangi laju penebangan pohon ini.



**Tabel 2.** Produksi Kayu Bulat Asal Hutan Rakyat Tahun 2013-2017

Kabupaten/ Kota	2013 (m <sup>3</sup> )	2014 (m <sup>3</sup> )	2015 (m <sup>3</sup> )	2016 (m <sup>3</sup> )	2017 (m <sup>3</sup> )
Cilacap	69.184,37	30.681,23	144.117,81	67.738,88	13.876,00
Banyumas	308.813,79	40.730,90	98.581,16	73.344,88	26.938,40
Purbalingga	23.628,32	466.478,66	447.078,50	181.893,52	12.974,00
Banjarnegara	90.788,43	81.381,43	74.999,14	103.084,28	88.503,50
Kebumen	37.117,69	37.019,25	17.263,53	41.834,75	25.945,90
Purworejo	46.693,16	149.133,00	142.432,54	190.944,26	216.307,50
Wonosobo	200.041,91	530.793,05	597.298,14	985.948,28	1.294.410,00
Magelang	37.449,98	17.586,12	8.046,57	45.872,33	78.088,35
Boyolali	74.297,10	114.355,79	128.214,99	63.695,07	49.794,08
Klaten	4.341,07	5.986,00	18.277,57	15.878,24	25.273,32
Sukoharjo	16.440,00	1.406,42	3.428,97	8.637,85	10.846,84
Wonogiri	42.137,66	100.803,48	25.461,18	32.857,15	34.966,56
Karanganyar	52.925,75	45.714,77	45.857,77	70.356,04	77.907,86
Sragen	1.092,22	9.140,15	10.254,54	12.720,25	21.674,50
Grobogan	136.392,00	6.959,48	1.460,71	9.274,91	1.468,00
Blora	104.318,50	3.020,23	1.175,05	7.660,00	4.378,06
Rembang	1.542,72	719,72	253,29	1.774,53	28.889,03
Pati	11.179,40	17.163,83	23.913,60	39.383,26	31.389,95
Kudus	17.446,00	49.328,35	25.771,81	3.846,03	10.696,28
Jepara	11.191,54	11.191,54	110.941,26	45.110,46	7.945,83
Demak	1.019,10	1.116,03	732,73	1.245,40	303,17
Semarang	22.919,55	18.724,90	4.506,48	45.323,17	119.975,17
Temanggung	57.834,43	109.029,90	129.227,00	101.003,01	127.292,17
Kendal	99.212,64	46.196,75	46.223,75	49.528,67	10.785,84
Batang	123.339,43	138.143,95	222.130,00	140.536,39	152.228,57
Pekalongan	42.281,06	45.821,66	260.848,91	64.596,01	36.512,42
Pemalang	21.186,43	34.190,64	39.602,93	97.303,15	105.198,25
Tegal	4.500,00	7.010,75	34.757,45	44.329,42	25.448,49
Brebes	880,40	2.285,03	20.514,43	32.031,85	32.826,82
Kota Magelang	-	-	-	-	-
Kota Surakarta	-	-	-	-	-
Kota Salatiga	-	-	841,99	560,48	1.113,47
Kota Semarang	4.545,79	2.888,89	3.084,06	1.218,97	1.852,58
Kota Pekalongan	-	-	-	-	-
Kota Tegal	-	-	-	-	-

Sumber : DLHK Provinsi Jawa Tengah

Program kredit tunda tebang memberikan manfaat untuk mengurangi laju penebangan, namun disisi lain terdapat kelemahan karena yang dijadikan jaminan hutang adalah pohon. Pohon yang dijadikan jaminan hutan akan ditebang, jika debitur tidak dapat menyelesaikan hutangnya. Penggunaan pohon sebagai agunan pinjaman tersebut merupakan permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut, karena penebangan pohon yang menjadi jaminan hutang akan memberikan dampak kerusakan lingkungan yang lebih besar. Hal tersebut bertolak belakang dengan tujuan dari program kredit tunda tebang, yang diharapkan dapat mengurangi laju penebangan.

Laju penebangan pohon yang tinggi akan berdampak secara ekologi, yakni terjadinya kerusakan lingkungan, salah satu indikator kerusakan lingkungan adalah luasan lahan kritis. Lahan kritis merupakan lahan baik yang di dalam maupun luar kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan sehingga berkurang atau kehilangan fungsinya sampai dengan pada batas yang ditentukan atau diharapkan (Peraturan Menteri Kehutanan No. P.32/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik RHL Daerah Aliran Sungai). Berdasarkan data Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun tahun 2020, luas lahan sangat kritis luar kawasan di Desa Polosiri Kecamatan Bawen 238,9 Ha dan di Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur 111,2 Ha, keduanya adalah desa tempat kredit tunda tebang pohon dilaksanakan. Luas lahan sangat kritis akan semakin bertambah jika terjadi penebangan pohon. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan strategi dalam menerapkan program kredit tunda



tebang, agar memperhatikan aspek kehati-hatian agar pohon jaminan tidak ditebang, sehingga luas lahan kritis tidak bertambah.

**Tabel 3.** Luas Lahan Kritis di Kecamatan Bawen dan Kecamatan Ungaran Timur Tahun 2020

No	Kecamatan	Desa	Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis
1.	Bawen	Asinan	293,2	205,7	3,1	4,0	-
2.	Bawen	Bawen	424,1	189,8	43,1	18,5	21,8
3.	Bawen	Doplang	208,7	1,0	18,6	-	-
4.	Bawen	Harjosari	330,9	45,7	151,7	34,2	20,7
5.	Bawen	Kandangan	21,1	128,2	411,3	158,7	279,6
6.	Bawen	Lemahireng	36,7	151,0	209,0	89,7	177,4
7.	Bawen	Polosiri	59,4	168,1	193,6	150,3	238,9
8.	Bawen	Poncoruso	137,0	27,8	-	-	-
9.	Bawen	Samban	132,8	0,8	-	-	-
10.	Ungaran Timur	Beji	51,9	70,5	127,9	-	-
11.	Ungaran Timur	Gedanganak	211,9	31,7	67,3	-	-
12.	Ungaran Timur	Kalikayen	45,2	8,1	207,0	206,2	55,7
13.	Ungaran Timur	Kalirejo	91,4	29,7	84,5	-	-
14.	Ungaran Timur	Kalongan	19,6	428,2	365,8	-	-
15.	Ungaran Timur	Kawengen	31,9	49,7	88,1	319,4	111,2
16.	Ungaran Timur	Leyangan	55,7	110,7	207,0	-	-
17.	Ungaran Timur	Mluweh	-	-	424,2	14,7	43,9
18.	Ungaran Timur	Sidomulyo	124,7	17,4	1,3	-	-
19.	Ungaran Timur	Susukan	126,7	6,2	62,5	-	-

Sumber : BPDASHL Pemali Jratun Tahun 2021.

Penelitian mengenai program kredit tunda tebang selama ini lebih ditekankan kepada sisi ekonomi, kelembagaan, karakteristik peminjam dan evaluasi pelaksanaan program kredit tunda tebang pohon. Penelitian dari sisi ekologi belum pernah dilakukan sejak program kredit tunda tebang pohon mulai dilaksanakan oleh pemerintah pada tahun 2012.

Hakim (2015) misalnya melaksanakan penelitian untuk melakukan penilaian kinerja pinjaman tunda tebang yang sudah berjalan di Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat (APHR) Kalimantan. Penelitian bertujuan untuk menghasilkan rumusan skema pembiayaan optimal yang dapat diaplikasikan oleh Badan Layanan Umum (BLU) ke depannya.

Penelitian mengenai program kredit tunda tebang pohon juga pernah dilakukan oleh Almadina (2016). Penelitian dengan judul Evaluasi Pinjaman Tunda Tebang Dana Bergulir di Kabupaten Pacitan ditujukan untuk mengetahui karakteristik peminjam dan evaluasi pelaksanaan program pinjam tunda tebang pohon. Pada penelitian tersebut belum ada analisis vegetasi dan strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program kredit tunda tebang untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Penelitian oleh Lusiya (2020) mengkaji pemahaman petani terhadap skema pinjaman tunda tebang dan mengkaji pelaksanaan pinjaman tunda tebang terhadap ketentuan pinjaman tunda tebang. Penelitian tersebut dilaksanakan di Kabupaten Blora dan Kabupaten Wonosobo. Penelitian mengenai program kredit tunda tebang juga pernah dilaksanakan pada tahun 2019. Penelitian Syamsu dkk (2019)

menganalisa karakteristik rumah tangga petani berikut hutan rakyatnya yang ikut program kredit tunda tebang di Bojonegoro.

Penelitian Nugroho (2011) misalnya, juga tidak mengkaji program kredit dari sisi ekologi, namun membandingkan program kredit sektor kehutanan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan pendekatan analisis kebijakan naratif, yakni Pinjaman Dana Bergulir Hutan Tanaman Rakyat (PDB-HTR) dan skema Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR). Pada penelitian terdahulu belum pernah ada yang mengkaji sisi ekologi, maka penelitian aspek ekologi perlu dilakukan. Pengkajian dari sisi ekologi dalam penelitian ini menggunakan analisa vegetatif, meliputi perhitungan komposisi jenis, indeks keanekaragaman dan indeks pemerataan. Kajian sisi ekologi dipergunakan untuk mengukur peran suatu jenis pohon yang dijadikan agunan dalam habitatnya di hutan rakyat.

Alasan mempergunakan analisa vegetasi dalam penelitian ini, adalah untuk mengetahui stabilitas tegakan hutan rakyat, yakni kemampuan ekosistem tegakan hutan rakyat untuk menjaga ekosistemnya tetap dalam kondisi stabil meskipun terdapat gangguan, sehingga akan diketahui kemantapan habitat tegakan hutan rakyat. Hasil penelitian untuk melengkapi data dan informasi dari sisi ekologi untuk menunjang keberhasilan program kredit tunda tebang pohon.

Pada penelitian ini dikaji aspek ekologi dan kebijakan. Selanjutnya akan dihasilkan rumusan strategi dengan menekankan aspek ekologi bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Penggunaan analisis SWOT untuk merumuskan rekomendasi strategi pelaksanaan program kredit tunda tebang

pohon. Penelitian sebelumnya belum ada yang mempergunakan analisis SWOT untuk mengkaji program kredit untuk petani.

## 1.2 Rumusan Masalah

Laju penebangan pohon hutan rakyat di Kabupaten Semarang cukup tinggi. Penebangan yang dilakukan oleh petani di lahan hutan rakyat adalah tebang butuh. Petani mengambil hasil hutan berupa kayu, kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Program kredit tunda tebang diharapkan dapat mengurangi laju tebang pohon dan menekan luasan lahan kritis. Dampak positif dengan dilakukan penundaan penebangan akan memberikan waktu bagi pohon untuk masak tebang dan memberikan manfaat ekologi yang lebih lama kepada lingkungan. Nilai jual pohon yang telah masak tebang juga lebih tinggi, sehingga pendapatan petani juga akan lebih meningkat.

Program kredit tunda tebang yang dijadikan agunan utang adalah pohon, akan muncul dampak negatif jika terjadi gagal bayar, karena pohon yang dijadikan jaminan akan ditebang untuk melunasi hutang. Kajian secara ekologi berupa perhitungan indeks nilai penting, keanekaragaman dan pemerataan perlu dilaksanakan agar dapat menggambarkan potensi vegetasi dan tegakan hutan rakyat, yang pohonnya dijadikan jaminan kredit. Perhitungan keanekaragaman jenis dan pemerataan akan memperlihatkan kestabilan suatu ekosistem, jika nilainya tinggi maka daya lenting ekosistem tersebut dalam menghadapi gangguan

akan baik. Kajian ekologis tersebut dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan dalam perumusan strategi kebijakan pelaksanaan program kredit tunda tebang untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pertanyaan penelitian yang menjadi landasan rumusan masalah untuk dikaji adalah:

1. Bagaimanakah kondisi ekologis berdasarkan atas Indeks Nilai Penting, Indeks Keanekaragaman dan Indeks Kemerataan hutan rakyat di lokasi debitur program kredit tunda tebang pohon di Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana pelaksanaan program kredit tunda tebang pohon di Kabupaten Semarang?
3. Bagaimana strategi pelaksanaan program kredit tunda tebang pohon yang berkelanjutan di Kabupaten Semarang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji kondisi ekologis hutan rakyat di lokasi debitur program kredit tunda tebang pohon di Kabupaten Semarang berdasarkan atas Indeks Nilai Penting, Indeks Keanekaragaman dan Indeks Kemerataan.
2. Mengkaji pelaksanaan program kredit tunda tebang pohon di Kabupaten Semarang.

3. Memberikan rekomendasi strategi pelaksanaan program kredit tunda tebang yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Semarang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, sebagai sarana belajar dan memperluas wawasan berpikir dalam menyikapi kondisi dan permasalahan utamanya mengenai kebijakan pemerintah yang diperuntukan bagi masyarakat tani.
- b. Bagi pemerintah, diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang akurat dalam penyusunan kebijakan/strategi pemberian dana bergulir dengan mempertimbangkan resiko terjadinya tunggakan kredit.
- c. Bagi masyarakat, sebagai bahan informasi mengenai kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### **1.5 Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian diperlukan sebagai salah satu cara untuk membuktikan tidak adanya plagiarisme antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan. Penelitian pelaksanaan program kredit tunda tebang pohon untuk merumuskan strategi mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dengan



pendekatan ekologi belum pernah dilakukan. Penelitian ini menggunakan analisa vegetasi dan SWOT.

Analisa vegetasi sebelumnya pernah dipergunakan dalam penelitian lain. Salah satunya adalah penelitian Heriyanto dan Subiandono (2007) tentang Studi Ekologi dan Potensi Geronggong (*Cratoxylon arborescens* BI) di Kelompok Hutan Sungai Berpasir-Sungai Siduung Kabupaten Tanjung Redeb Kalimantan Timur. Penggunaan analisa vegetasi di hutan rakyat yang pohonnya dijadikan pinjaman belum pernah dilaksanakan.

Penelitian mengenai program kredit tunda tebang belum banyak dilakukan, dan penelitian mengenai kredit tunda tebang selama ini belum ada yang mengkaji sisi ekologi. Penelitian sebelumnya oleh Dwiprabowo (2005) lebih menitikberatkan pada analisis kebijakan kredit dan pembiayaan usaha tani hutan. Kajian aspek ekologi perlu dilakukan untuk mendukung pengelolaan hutan yang lestari dan pembangunan yang berkelanjutan.

Sekolah Pascasarjana

**Tabel 4.** Kumpulan Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti/Tahun/Judul	Tujuan	Metode	Hasil
1.	Hariyanto Dwiprabowo, 2005. Judul : Analisa Kebijakan Skema Kredit dan pembiayaan Usaha Tani Hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan penilaian atas kredit usaha tani hutan rakyat (KUHR)</li> <li>- Mengkaji sumber pembiayaan kredit</li> <li>- Memberikan rekomendasi perkreditan usaha tani hutan</li> </ul>	Metode sintesis kualitatif, dengan sumber data dari laporan, forum diskusi, data skunder dan primer dengan pelaku kredit seperti bank dan kelompok tani.	<p>Kredit usaha tani pada masa yang akan datang perlu memperhatikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian pinjaman perlu disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.</li> <li>- Mitra kelompok tani perlu dipilih dengan lebih selektif.</li> <li>- Peranan bank penyalur kredit perlu lebih proposional.</li> <li>- Sumber pembiayaan selain berasal dari dana reboisasi, juga berasal dari perbankan nasional dan sumber dana luar negeri.</li> </ul>
2.	N.M. Heriyanto dan Endro Subiandono, 2007. Judul : Studi Ekologi dan Potensi Geronggong ( <i>Cratoxylon arborescens</i> BI.) di Kelompok Hutan Sungai Bepasir-Sungai Siduung Kabupaten Tanjung Redeb, Kalimantan Timur.	Mengetahui ekologi dan potensi kayu Geronggong di habitat alamnya.	Analisis indeks nilai penting.	Jenis tumbuhan yang mendominasi tegakan di kelompok hutan hutan Sungai Bepasir – Sungai Siduung yakni Pisang-pisang ( <i>Mezzetia parviflora</i> ) dengan INP 26,6%, Meranti ( <i>Shorea spp.</i> ) dengan indeks nilai penting (INP) 38,3%, dan Mertibu ( <i>Dacrylocladus stenostachys</i> ) dengan INP 23,2 %. Perhitungan INP di hutan primer menunjukkan Meranti (INP 28,7%), Pisang-pisang (INP 23,5%) dan Perupuk ( <i>Lophopetalum javanicum</i> ) dengan INP 17,9%.. Geronggong memiliki INP 8,2% pada hutan skunder dan 8,8% pada hutan primer.
3.	Bramasto Nugroho, 2010.	Penelitian diarahkan untuk memberikan masukan	Perilaku debitur dan presepsi terhadap PDB-HR dilakukan	Hasilnya dibutuhkan pengembangan kelembagaan dan skema PDB HR termasuk

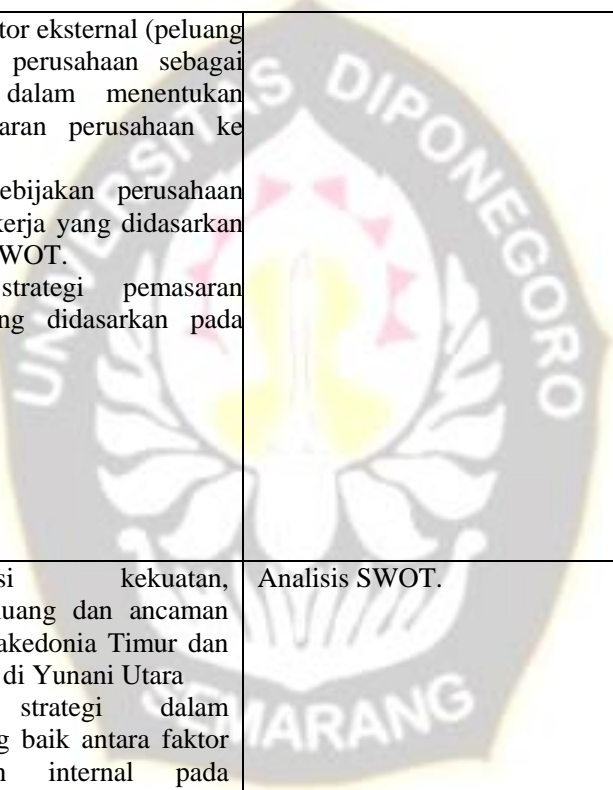
	Judul : Pembangunan Kelembagaan Pinjaman Dana Bergulir Hutan Rakyat	pengembangan kelembagaan Pinjaman Dana Bergulir (PDB) Hutan Rakyat dengan mempergunakan analisis kelembagaan dan kerangka kerja pengembangan.	dengan survei mempergunakan teknik wawancara terstruktur dengan kuesioner.	didalamnya basis perhitungan besarnya pinjaman, peruntukan pinjaman, kelompok sasaran, plafon kredit dan waktu pengembalian. Prinsip pertumbuhan organisasi PDB HR untuk mempermudah rakyat miskin memperoleh pinjaman yakni kesederhanaan, keterjangkauan, kesesuaian, kelayakan, keberlanjutan, keterbukaan, keterawasan, pendampingan dan pembelajaran.
4.	Bramasto Nugroho, 2011. Judul : Analisis Perbandingan Beberapa Skema Pinjaman untuk Pembangunan Hutan Tanaman Berbasis Masyarakat di Indones	Membandingkan skema Kredit Dana Bergulir pada Hutan Tanaman Rakyat (PDB-HTR) dan Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR).	Pendekatan analisis kebijakan naratif.	Hasil penelitian menunjukkan PDB-HTR mempunyai banyak kesamaan dengan skema pinjaman KUHR. Perbaikan kebijakan PDB-HTR yakni skema pinjaman dan orientasi pada organisasi tingkat kecil, prosedur aplikasi, dan sosialisasi, serta mekanisme fasilitator.
5.	Dong-June Yeom dan Ji Hong Kim, 2011. Judul : Comparative evaluation of species diversity indices in the natural deciduous forest at Mt. Jeombong.	- Mengetahui peningkatan spesies - Memahami struktur tegakan melalui INP, kurva kelimpahan, indeks keanekaragaman, tutupan kanopi, indeks kemerataan, indeks Margalef, indeks Shannon-Wiener, indeks Simpson, indeks McIntosh dan indeks Berger-Parker.	Metode sampling plot untuk menguji indeks nilai penting, kurva sebaran spesies, komposisi spesies. Menghitung indeks keanekaragaman dengan Indeks Margalef, indeks Shannon-Wiener, indeks Simpson, indeks McIntosh dan indeks Berger-Parker.	Spesies yang dominan untuk kanopi atas adalah <i>Quercus mongolica</i> , kanopi tengah <i>Acer mandshuricum</i> dan kanopi bawah <i>Syringa reticulate var. mandshurica</i> . Kurva kelimpahan spesies, indeks margalef, indeks Shannon-Wiener, indeks Simpson, indeks McIntosh dan indeks Berger-Parker menunjukkan kemerataan spesies rendah.
6.	Eva Fauziyah dan	Mengetahui faktor utama yang	Identifikasi faktor-faktor dalam	Faktor kekuatan utama yang mempengaruhi

	<p>Dian Diniyati, 2011. Judul : Identifikasi Faktor Utama Pondok Pesantren dalam Pengembangan Hutan Rakyat.</p>	<p>dimiliki Pondok Pesantren (Pontren) dalam strategi pengembangan dan pengelolaan hutan rakyat.</p>	<p>Pontren yang mempunyai pengaruh kuat terhadap pengelolaan hutan rakyat dengan menggunakan analisis SWOT berdasarkan pendapat para pakar yang mengetahui dengan baik mengenai Pontren.</p>	<p>adalah pemimpin yang karismatik dengan nilai pengaruh 0,56 dan factor kelemahan utama yang harus diminimalkan adalah Sifat mengkultuskan satu pemimpin dan tidak adanya keberlanjutan program dengan nilai pengaruh 0,47. Faktor peluang utama yang harus dimanfaatkan pontren yakni adanya ayat Alquran dan hadist yang mendukung penyelamatan lingkungan, nilai 0,5 dan faktor ancaman utama adalah banyaknya pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan kebutuhan kehutanan dengan nilai pengaruh 0,62. Strategi yang paling sesuai adalah strategi SO (<i>Strength Opportunities</i>) berupa meningkatkan peran pemimpin dan memperluas jaringan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.</p>
7.	<p>Desi Indriani, Sambas Basuni, dan Bambang Supriyanto, 2013. Judul : Penerapan Badan Layanan Umum (BLU) dan Implikasinya bagi Pengelolaan Taman Nasional Mandiri yang Berkelanjutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan identifikasi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TN,</li> <li>2. Melakukan analisis ketepatan penerapan model BLU pada pengelolaan TN untuk mewujudkan TN yang mandiri</li> <li>3. Merumuskan implikasi dari penerapan BLU menuju pengelolaan TN yang berkelanjutan dan mandiri</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi penjabaran tupoksi TN dilakukan dengan analisis isi dan analisis deskriptif.</li> <li>- Analisis ketepatan dalam penerapan model BLU pada pengelolaan menuju TN mandiri melalui analisis isi dan deskriptif, dengan membandingkan antara persyaratan substantif dan teknis BLU dengan PP No.23 Tahun 2005 yang mengatur Pengelolaan BLU. Analisis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat 8 tupoksi dari 10 tupoksi TN yang penjabaran pelaksanaannya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa dan peningkatan kinerja pelayanan melalui BLU. Tupoksi pelayanan sipil merupakan bagian dari kewajiban pemerintah terdapat 2 tupoksi.</li> <li>- Secara substantif, TN memenuhi kategori sebagai penyedia barang dan/jasa. Variasi barang dan/atau jasa yang dijual dengan kriteria <i>quasipublic goods</i> untuk setiap tupoksi TN telah sesuai dengan identifikasi penjabaran tupoksi.</li> </ul>

			<p>perbandingan manfaat biaya ditambahkan dalam penelitian sebagai salah satu bahan pertimbangan keputusan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis implikasi penerapan BLU dalam rangka pengelolaan TN yang mandiri dan berkelanjutan dilaksanakan melalui analisis isi dan deskriptif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian menunjukkan bahwa melalui skema BLU TN secara finansial sangat mungkin dapat menjadi mandiri.</li> </ul>
8.	<p>Bambang Hendroyono dkk, 2015 Judul : Strength, Weakness, Opportunity and Threat (SWOT) of The Implementation of HTR Policy in Indonesia.</p>	<p>Mengidentifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman dalam penerapan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).</p>	<p>Analisis SWOT</p>	<p>Kekuatan HTR adalah kemauan yang kuat dari masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengelola kawasan hutan, ketersediaan wilayah, dan dukungan dari pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Kelemahan HTR yakni ketidakpastian investor, keterbatasan sumber daya manusia penyuluh kehutanan dan masyarakat. Peluang HTR adalah adanya pasar pemanfaatan lahan hutan dengan komoditas non kehutanan, kebijakan pemerintah dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada daerah yang tertinggal. Ancaman HTR yakni jaminan kelestarian produksi kehutanan, fluktuasi permintaan kayu, klaim kepemilikan lahan oleh komunitas atau adat. Rekomendasi dari analisis SWOT adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SO : regulasi insentif untuk kegiatan kehutanan, mengoptimalkan pengembangan agroforestry, mengoptimalkan pendanaan</li> </ul>

				<p>(APBD, APBN, Non APBN/APBD) untuk pengembangan HTR.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- WO : penambahan jumlah SDM penyuluh kehutanan dan peningkatan investor kehutanan.</li> <li>- TO : pendampingan pelaksanaan program HTR, pemberdayaan dan fasilitasi kelembagaan masyarakat serta meningkatkan koordinasi dengan instansi teknis.</li> <li>- WO : melakukan koordinasi antar instansi dan studi kelayakan akademik serta roadmap HTR.</li> </ul>
9.	<p>Hafid Faris Hakim, 2015. Judul: Perumusan Strategi Penguatan Implementasi Kebijakan Pinjaman Tunda Tebang Oleh Badan layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Studi Kasus di asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Kalimendong)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan penilaian kinerja kredit tunda tebang yang sudah berjalan di APHR Kalimendong</li> <li>- Merumuskan skema pembiayaan optimal yang dapat dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum (BLU) pada masa yang akan datang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensi Service Quality (SERVQUAL), yakni dengan membandingkan antara nilai kepentingan dan nilai kinerja.</li> <li>- Kuadran Importance Performance Analsys (IPA).</li> <li>- Analytical Hierarchy Process (AHP).</li> </ul>	<p>Strategi dan faktor terpilih untuk memastikan dana tersalurkan yakni keberadaan penyelia operasional (PO) dengan nilai 0,381 dan akses pendanaan dengan nilai 0,323. Adapun untuk memastikan dana dapat kembali, faktor yang terpilih adalah harga dan pasar kayu dengan nilai 0,420. Strategi yang terpilih adalah pendampingan kelompok tani (nilai 0,252).</p>
10.	<p>Robi Setyawan, 2015. Judul : Penerapan analisis SWOT sebagai landasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui faktor internal (kekuatan dan kelemahan) perusahaan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan perusahaan.</li> </ul>	<p>Analisis SWOT</p>	<p>1. Hasil analisis data nilai faktor internal yaitu 3.01 (memiliki nilai tinggi dengan penilaian skala likert) merupakan penjumlahan rating faktor kelemahan dan</p>



	<p>Merumuskan Strategi Pemasaran Usaha Jasa Sewa Mobil “AMAN-AMIN” Transport Tours and Travel Ambarketawang Sleman Yogyakarta.</p>	<p>- Mengetahui factor eksternal (peluang dan ancaman) perusahaan sebagai pertimbangan dalam menentukan strategi pemasaran perusahaan ke depan.  - Menentukan kebijakan perusahaan dalam system kerja yang didasarkan pada Analisis SWOT.  - Menentukan strategi pemasaran perusahaan yang didasarkan pada analisis SWOT.</p>		<p>kekuatan perusahaan.  2. Hasil analisis dan nilai faktor eksternal yakni 3,44 (memiliki arti nilai tersebut tinggi berdasarkan skala likert ) didapat dari total penjumlahan rating faktor ancaman dan peluang perusahaan.  3. Usaha jasa sewa mobil : “AMAN-AMIN” Transport Tours dan Travel Ambarketawang berada dalam fase pertumbuhan dengan nilai faktor internal 3,01 dan faktor eksternal 3,44.  4. Strategi pemasaran yang sesuai diterapkan yakni strategi SO (<i>Strength Opportunities</i>). Strategi SO dilakukan untuk menangkap peluang pasar yang tinggi dengan cara memanfaatkan kekuatan perusahaan.</p>
11.	<p>Vassiliki Kazana, 2015.  Judul : SWOT Analysis for Sustainable Forest Policy and Management : A Greek Case Study.</p>	<p>Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman untuk hutan Makedonia Timur dan wilayah Thrace di Yunani Utara  Menentukan strategi dalam kesesuaian yang baik antara faktor eksternal dan internal pada pengelolaan hutan lestari.</p>	<p>Analisis SWOT.</p>	<p>Kekuatan pengelolaan hutan yakni produksi kayu bakar, kayu industri, penyerapan tenaga kerja lokal dalam ppekerjaan hutan, pendapatan dari hutan, atraksi alam dan budaya di hutan.  Kelemahan dalam pengelolaan hutan adalah kelembagaan, karena kemungkinan besar terkait dengan krisis keuangan yang sedang dialami Negara, kurangnya dana untuk investasi, termasuk kurangnya dana untuk studi rencana pengelolaan hutan, peraturan kehutanan yang rumit, masalah kepemilikan lahan hutan dan keterbatasan sumber daya manusia.  Peluang yang terkait faktor kekuatan utama</p>

				<p>yakni peningkatan stok kayu, peningkatan pendapatan melalui produksi hasil hutan bukan kayu dan peningkatan lapangan kerja bagi penduduk lokal.</p> <p>Ancaman terutama yang terkait dengan factor abiotik, seperti kebakaran hutan dan faktor biotik meliputi penebangan liar, perburuan liar, perambahan lahan hutan dan perubahan penggunaan lahan.</p>
12.	<p>Suspense Averti Ifo dkk, 2016.</p> <p>Tree Species Diversity, Richness and Similarity in Intact and Degraded Forest in The Tropical Rainforest of The Congo Basin : Case of The Forest of Likouala in The Republic of Congo.</p>	<p>Mengidentifikasi dan mengukur spesies pohon hutan hujan tropis Likouaka, analisis floristic hutan Impfondo-Dongou, Likouala dan analisis floristic heterogenitas antar plot antar hutan.</p>	<p>Menggunakan indeks keanekaragaman Shannon, keanekaragaman spesies, komposisi spesies dan dominasi spesies.</p>	<p>Luas area penelitian 3,75 Ha, dengan 1,611 pohon mewakili 114 spesies. dan 35 family. Family yang dominan Euphorbiaceae terdiri atas 12 spesies, Fabaceae-Mimosoideae (10 spesies), Phyllanthaceae (6 spesies) dan Guttferae (6 spesies). Keanekaragaman hayati sangat tidak bervariasi dari satu plot ke plot lain di seluruh wilayah studi. Nilai indeks Shannon yang rendah diperoleh pada plot 11 (<math>H = 0,75</math>) sedangkan nilai tertinggi diperoleh pada plot 12 (<math>H = 4,46</math>). Hasil yang diperoleh menunjukkan keanekaragaman hayati pohon yang tinggi di hutan Impfondo-Dongou.</p>
13.	<p>Tri Wahyu Almadina, 2016</p> <p>Judul : Evaluasi Pinjaman Tunda Tebang Dana Bergulir di Kabupaten Pacitan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui karakteristik petani hutan rakyat serta implementasi dan pemanfaatan pinjaman Tunda Tebang Fasilitas dana Bergulir (FDB – HR) oleh petani.</li> <li>- Mengevaluasi pelaksanaan pinjaman tunda tebang FDB-HR.</li> <li>- Mengevaluasi pencapaian tujuan pinjaman tunda tebang FDB-HR</li> </ul>	<p>Pendekatan deskriptif dan kuantitatif indikator untuk mengevaluasi pelaksanaan dan efektifitasnya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Responden sebagian besar adalah petani (63,01%), dengan luas lahan garapan rata-rata 1,52 Ha/KK, pendapatan rata-rata Rp. 608.612 per bulan.</li> <li>2. Pemanfaatan kredit untuk modal usaha (68,93%) dan keperluan konsumtif (31,07%).</li> <li>3. Pelaksanaan program kredit tunda tebang berada pada kategori cukup baik.</li> </ol>

		untuk mengetahui tingkat efektifitasnya.		4. Program pinjaman tunda tebang cukup efektif mencapai tujuannya yang ditandai dengan adanya beberapa aspek yang tercapai sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pendapatan petani.</li> <li>- Usaha produktif berkembang.</li> <li>- Membantu dalam perbaikan sistem administrasi kelompok tani.</li> <li>- Peningkatan hubungan antara kelompok tani dan kelompok masyarakat (pokmas) lainnya.</li> </ul>
14.	Duhita Herlyn Lusiya, 2017. Judul : Implementasi Pinjaman Tunda Tebang Hutan Rakyat di Kabupaten Blora dan Kabupaten Wonosobo	Menjelaskan implementasi Pinjaman Tunda Tebang (PTT) yang sudah disalurkan. Tujuan antara penelitian adalah : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkaji pemahaman petani terhadap skema PTT</li> <li>- Mengkaji pelaksanaan PTT terhadap ketentuan PTT</li> </ul>	Pendekatan kuantitatif dan pengumpulan data dengan survei pada petani hutan rakyat. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan uji t dengan aplikasi SPSS 21 for windows.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemahaman petani terhadap program dipengaruhi oleh kognitif, konasi dan afeksinya.</li> <li>- Pemahaman dan pengetahuana petani non debitur sudah baik, sebanyak 70 % petani telah mengetahui program PTT.</li> <li>- Pelaksanaan PTT berdasarkan ketentuan kredit dalam prinsip 4T, yakni Tepat pelaku, Tepat Lokasi, Tepat Kegiatan, dan tepat Penyaluran dan Pengembalian.</li> </ul>
15.	Rasolofoson <i>et al.</i> , 2017 Judul : Impacts of Community Forest Management on Human Economic Well-Being across Madagascar	Dampak pengelolaan hutan rakyat pada standart hidup rumah tangga yang diukur dengan pengeluaran konsumsi perkapita.	Uji sensitivitas dengan variabel pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita tahunan.	Secara karakteristik, rumah tangga yang mengelola hutan memiliki lebih banyak kawasan hutan. Hutan memberikan efek yang bervariasi kepada rumah tangga yang mengelola hutan. Pengelolaan hutan mempunyai dampak positif terhadap pendapatan perkapita rumah tangga yang mengelola hutan yang berlokasi di tepi hutan, dengan perkiraan pengaruh maksimum

				US\$50. Namun di rumah tangga yang berlokasi jauh dari hutan, pengelolaan hutan berdampak negatif terhadap rumah tangga yang mengelola hutan, dengan perkiraan pengaruh minimum US\$-60.
16.	Santika <i>et al.</i> , 2017. Judul : Community Forest Management in Indonesia : Avoid Deforestation in The Context of Anthropogenic and Climate Complexities.	Menilai kinerja pengelolaan Hutan Desa dalam mengatasi deforestasi di Indonesia.	Pendekatan pencocokan spasial untuk menilai kinerja kepemilikan hutan desa dalam mengatasi deforestasi. Analisis kontrafaktual kemungkinan deforestasi tanpa adanya kepemilikan Hutan Desa.	Pengelolaan hutan desa berpengaruh baik dalam mengatasi deforestasi. Tekanan antropogenik yang kuat dan kompleks serta iklim ekstrim merupakan tantangan utama dalam pengelolaan hutan desa.
17.	Imam Fauzi Syamsu dkk, 2019) Judul : Pinjaman Tunda Tebang Hutan Rakyat : Siapa yang Mengakses? (Studi Kasus : Hutan Rakyat di Bojonegoro)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menganalisis karakteristik rumah tangga petani dan hutan rakyatnya peserta Program Tunda Tebang Hutan Rakyat.</li> <li>- Memberikan gambaran apakah program tunda tebang cenderung diakses oleh petani HR yang tergolong miskin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendekatan kuantitatif dalam kategori pendekatan positivisme.</li> <li>- Metode gabungan antara analisis deskriptif dan analisis statistic inferensia.</li> </ul>	Petani peserta Program Tunda Tebang Hutan Rakyat masuk kedalam kategori petani tidak miskin/sejahtera. Program kurang tepat sasaran, ditinjau dari bentuk skema (kredit mikro atau kecil) dan tujuan diberikannya program, karena yang memperoleh pi jaman ini sebagian besar adalah petani HR kategori sejahtera.

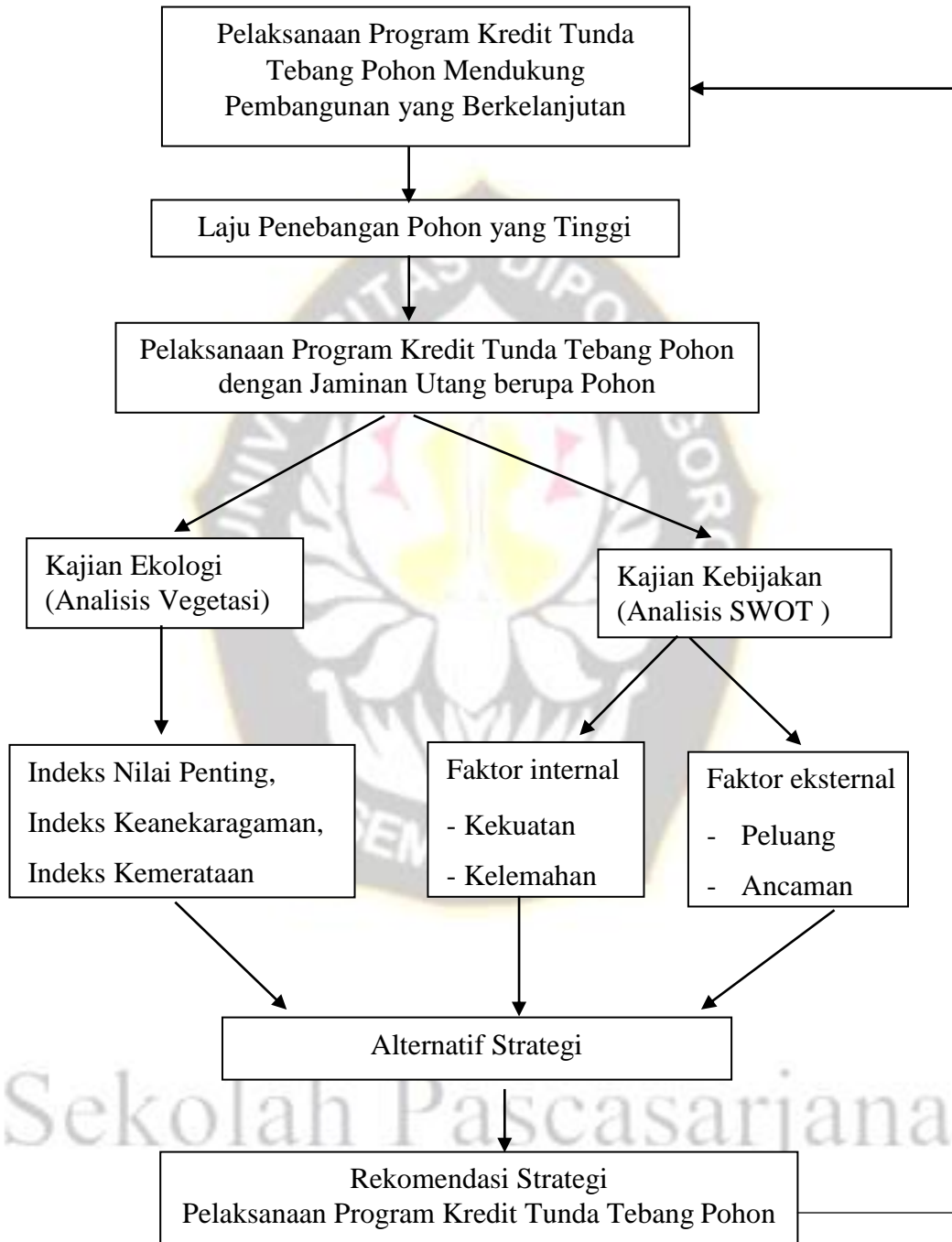
Sejumlah penelitian mengenai program kredit tunda tebang sudah pernah dilaksanakan. Berbeda dengan penelitian yang terdahulu, pengkajian aspek ekologi yang dimasukkan dalam perumusan strategi pelaksanaan kebijakan merupakan keterbaruan dari penelitian ini. Penelitian sebelumnya belum pernah mengkaji aspek ekologi sekaligus juga kebijakan yang berkelanjutan dari pelaksanaan program kredit tunda tebang.

Penggunaan metode analisa vegetasi untuk mengkaji aspek ekologi merupakan hal yang berbeda dari penelitian ini. Analisis vegetasi untuk mengetahui komposisi jenis, indeks keanekaragaman dan indeks pemerataan di lokasi hutan rakyat debitur program kredit tunda tebang pohon.

Pada penelitian ini juga dipergunakan analisa SWOT untuk dapat merumuskan kebijakan program kredit tunda tebang yang menekankan pada aspek ekologi. Hasil penelitian akan menghasilkan rekomendasi strategi pelaksanaan program kredit tunda tebang pohon yang mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Sekolah Pascasarjana

### 1.6 Kerangka Pemikiran Penelitian



Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian